

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kampus merupakan instansi memiliki ciri khusus dengan masyarakatnya yang sering disebut dengan sivitas akademika atau masyarakat akademis. Disebut dengan demikian dikarenakan warga kampus menjalankan kegiatan akademis yang memiliki sifat Ko-kurikuler, kurikuler dan ekstra kurikuler. Masyarakat atau warga memiliki sifat sangat ingin tahu dengan segala fenomena yang ada serta melakukan kegiatan secara ilmiah dan memperoleh kebenaran teruji sesuai dengan kaidah metode ilmu pengetahuan disebut juga sebagai masyarakat akademis.¹

Masyarakat akademis dapat memperoleh kebenaran yang teruji karena memiliki sistematika dan kerangka berfikir yang sistematis berdasarkan data dan fakta serta kemampuan dalam menganalisis temuannya. Dengan demikian kondisi tersebut masyarakat akademis bukan berarti terdapat kecenderungan memiliki sifat eksklusif akan tetapi sebagai bentuk Tindakan yang selektif dalam memelihara karakter serta ciri khasnya. Selain adanya terdapat tradisi, masyarakat akademis tentu perlu adanya peraturan Bersama yang mengikat dan mengatur kinerja warganya. Masyarakat akademis dalam kampus dapat diatur dengan tertib dengan cara perpaduan sinergis antara tradisi serta peraturan.

¹ Novrys Suhardianto dan Hendriyat Surgandhi, “Akuntabilitas Organisasi Mahasiswa Akuntansi”, Jurnal Riset Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 1 No. 3, Maret 2016, hlm. 179.

Misal didalam tradisi dapat memberikan kemantapan kehidupan akademik pada kampus, akibatnya peraturan dapat digariskan sebagai wadah dalam pembaharuan serta penyesuaian. Dalam suatu kampus masyarakat akademis dapat tertib dan tepelihara dengan baik bila mana peraturan yang berlaku serta tradisi akademik dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku oleh elemen dan sivitas akademika lainnya.

Ormawa atau yang sering kita sebut dengan Organisasi Kemahasiswaan mereka memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan perguruan tinggi. Tetapi realitanya peran itu belum dapat diakomodir dengan komprehensif oleh berbagai peraturan tentang kemahasiswaan di perguruan tinggi meskipun fungsinya sudah diterapkan. Akibatnya peran organisasi kemahasiswaan belum terasa maksimal dan optimal sebagai penggerak dalam perguruan tinggi

Menurut peraturan UU/No.12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang ada dalam pasal 14 ayat 2 dijelaskan secara jelas mahasiswa didalam melaksanakan kegiatan ko-kurikuler serta ekstrakurikuler dapat ditampung melalui Ormawa yang berada di perguruan tinggi. Mahasiswa bisa membentuk ormawa seperti yang dijelaskan Dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 ormawa memiliki fungsi dalam mengembangkan tanggungjawab sosial serta memberi wadah dalam kegiatan mahasiswa serta mengembangkan kreatifitas mahasiswa. Bentuk dari ormawa di perguruan tinggi sangat berbeda Struktur Ormawa , tata Kelola dan manajemen dikarenakan semua diserahkan Kembali ke perguruan tinggi masing-masing.

Didalam permendikbud No.155/1998 hanya memayungi dasar norma, fungsi serta peran ormawa tidak sepenuhnya. Sedangkan didalam

PP/No.04/2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pendidikan tinggi serta pengelolaan perguruan tinggi yang merupakan lanjutan dari UU.No12/2012 tidak mengatur dengan jelas tentang ormawa di perguruan tinggi.² Mahasiswa memiliki dimesi yang sangat luas karena merupakan satu dari elemen kampus dengan secara kelompok maupun individual didalam organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa juga memiliki tugas dan tantangan dimasa yang akan datang karena merupakan komunitas pemuda dalam dimensi sosial dan dimensi keilmuan atau akademika. Mahasiswa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya karena memiliki hak, kewajiban dan kesadaranya. Mahasiswa dapat meningkatkan wawasan intelektual dan kepribadianya melalui organisasi kemahasiswaan baik di Perguruan Tinggi Ataupun Perguruan Tinggi Keagamaan dibawah naungan kementerian agama. Kontribusi perguruan tinggi sangat penting untuk membina dan mengembangkan kepribadian masyarakat terutama mahasiswa dalam mencapai tujuan serta fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa , bermartabat dalam mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang bertaqwa, beramal dan berilmu.

Alhasil untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, penalaran, dan intelektual mahasiswa dapat bergabung dalam organisasi mahasiswa intra kampus. Didalam mencari keilmuan dan pengalaman baru melalui organisasi mahasiswa harus mengedepankan kejujuran serta kebenaran. Sebagai insan akademisi, mahasiswa dituntut untuk berintegritas dengan kondisi apapun.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Organisasi sektor publik mendapatkan dana anggaran dari negara salah satunya yaitu kampus atau yang sering disebut sebagai perguruan tinggi. Dimana anggaran itu harus dikelola serta dilokasikan untuk pembangunan berkelanjutan yang berada dalam perguruan tinggi serta untuk membiayai organisasi-organisasi yang berada dibawah instansi terkait. Organisasi mahasiswa di institut atau universitas terdiri dari SEMA atau yang sering dikenal sebagai Senat Mahasiswa merupakan Lembaga legislatif mahasiswa. Sedangkan Organisasi Mahasiswa eksekutif di tingkat institut yaitu DEMA atau yang sering dikenal sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu pada tingkat institut atau universitas terdapat UKM (unit kegiatan mahasiswa) serta UKK (unit kegiatan khusus). Ditingkat fakultas juga terdapat organisasi mahasiswa yang terdiri dari Lembaga legislatif dan Lembaga eksekutif. Lembaga legislatif ditingkat mahasiswa fakultas terdiri dari SEMA-F atau yang sering kita sebut sebagai Senat Mahasiswa Fakultas. Sedangkan Lembaga eksekutif terdiri dari DEMA-F (dewan eksekutif mahasiswa fakultas) dan HMJ (himpunan mahasiswa jurusan) sesuai dengan fakultas serta jurusannya masing-masing.³

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang sangat spesifik dan unik yang ingin dicapai. Tujuan organisasi bisa bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Tujuan kuantitatif dan kualitatif tersebut juga masih dapat dipilah lagi kedalam tujuan yang bersifat finansial dan nonfinansial. Tujuan yang bersifat kuantitatif misalnya adalah pencapaian laba semaksimal mungkin, penguasaan pangsa

³ Undang-undang SEMA IAIN Tulungagung Tahun 2020 tentang Peraturan Organisasi kemahasiswaan.

pasar, pertumbuhan organisasi dan produktivitas organisasi. Tujuan kualitatif misalnya efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang Tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, *corporate image* dan sebagainya. Terlihat dari tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, perbedaan yang sangat menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat yang tinggi dalam memaksimalkan laba (*profit motive*). Sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba, akan tetapi pemberian pelayanan publik (*public service*) seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

Pola pertanggungjawaban manajemen organisasi pada sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta memiliki tanggungjawab kepada pemilik perusahaan/organisasi sedangkan pada sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dananya yang digunakan dalam rangka pemberian pelayanan publik bersal dari masyarakat. Pola pertanggungjawaban disektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban disektor publik bersifat vertikal (*vertical account ability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah provinsi terhadap pemerintah pusat serta pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban

horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban terhadap masyarakat luas atau dalam perguruan tinggi sering disebut mahasiswa.

Perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta juga dapat dilihat dari berbagai sumber pendanaan organisasi atau dalam manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Didalam struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat resiko pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, *charging for services*, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah yang berupa hutang luar negeri dan obligasi pemerintah serta pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Di dalam pasal 10 surat keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan No./155/U/1998 bab V dijelaskan bahwasanya pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan dibebankan dalam anggaran perguruan tinggi tempat dimana organisasi kemahasiswaan itu berada dengan seizin pimpinan.⁴ Seharusnya organisasi kemahasiswaan yang sehat dapat menyajikan informasi tentang pertanggungjawaban penggunaan dana yang diperoleh selama periode kepengurusannya. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program kerja dibutuhkan suatu aturan yang mengatur akan kebutuhan penyediaan informasi.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵ Greenberg, M.T dkk, "Enhancing School-based Prevention and Youth Development through Coordinated Social, Emotional, and Academic Learning" *DJournal American Psychologist* Vol. 58, No. 67. 2013, hlm. 468.

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 pasal 7 dijelaskan tentang Asas Akuntabilitas merupakan asas pertanggungjawaban hasil akhir suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertinggi. Dalam menjalankan sebuah roda organisasi tidak dapat lepas dari sebuah anggaran keuangan, dimana dengan adanya anggaran organisasi kemahasiswaan dituntut untuk dapat mengelola dengan sebaik mungkin yang nantinya agar dapat dipertanggungjawabkan pengeluaran dan pemasukanya dikhalayak umum terlebih khusus untuk masing-masing anggotanya.⁶

Salah satu alasan peneliti tertarik membuat penelitian judul ini yaitu realitanya masih kurangnya penerapan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi mahasiswa masih memiliki kendala dalam laporan keuangannya. Seperti pernah diucapkan oleh ketua dan bendahara domisioner salah satu ormawa didalam menjalankan roda organisasi, terutama dalam hal pelaporan keuangan organisasi kemahasiswaan belum adanya transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh salah satu organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti, sangat tertarik untuk melakukan riset penelitian tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung. karena notabnya merupakan kampus yang berada dibawah naungan kementerian agama, dimana anggaran organisasi kemahasiswaan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bersumber dari anggaran dana pemerintah. Akibatnya organisasi kemahasiswaan dituntut agar melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan organisasi sebagai bentuk pertanggung jawabnya. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dana pengembangan Pendidikan organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan dana pengembangan pendidikan organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung?
2. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas anggaran dana pengembangan pendidikan organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian diatas maka tujuan dilakukanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan dana pengembangan pendidikan organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung.
2. Mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas anggaran dana pengembangan pendidikan organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Masalah yang ada diatas dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Sosialisasi Proses pengelolaan dana pengembangan Pendidikan yang masih kurang
- b) Kurangnya transparansi dan akunbel dalam pengelolaan anggaran dana pengembangan Pendidikan

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberi Batasan atas permasalahan yang ada dikarenakan waktu yang singkat.

- a) Proses pengelolaan anggaran dana pengembangan Pendidikan
- b) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana pengembangan pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil analisis yang diperoleh didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini agar memberikan sumbangan yang berarti terhadap konsep teoritis dalam perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang keilmuan akuntansi Syariah mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran dana pengembangan Pendidikan di organisasi kemahasiswaan yang mana judul tersebut termasuk ke dalam mata kuliah yaitu sistem keuangan sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi IAIN Tulungagung

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi ilmiah yang diharapkan bermanfaat untuk dijadikan referensi maupun penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas anggaran dana pengembangan pendidikan yang ada dalam organisasi mahasiswa

b. Bagi Organisasi Mahasiswa

Penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan masukan dalam menilai kinerja Transparansi dan Akuntabilitas anggaran dana pengembangan pendidikan yang ada dalam organisasi kemahasiswaan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi peneliti dimasa yang akan datang dalam membahas permasalahan yang sama

F. Penegasan Istilah

Sebagai bahan untuk menjelaskan yang akan dibahas dalam penelitian ini serta untuk menghindari kesalah artian dalam memahami judul dalam penelitian ini maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional.

1. Definisi Konseptual

a. Pengertian Transparansi

Menurut pakar ahli Coryanata dalam mencapai good governance maka diperlukan prinsip transparansi. Transparansi ini diawali dengan dasar arus informasi yang bebas dari pengaruh pihak manapun serta dapat dipantau oleh orang lain.⁷ Definisi lain menurut Abdul Halim berpendapat keterbukaan dapat diartikan sebagai transparansi, yang dikaitkan dengan akuntabilitas memiliki arti bahwa pertanggungjawaban dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai penilaian pemerintah.

b. Pengertian Akuntabilitas

Menurut pakar Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban kepada khalayak publik setiap aktivitas yang telah dilakukan. Definisi lain menurut ahli Siahan akuntabilitas adalah suatu kewajiban seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja kepada pihak yang mempunyai kewajiban atau hak untuk meminta keterangan keberhasilan atau kegagalan dalam pertanggungjawabannya selama periode berjalan.

c. Pengertian pengelolaan anggaran

Menurut Adisasmita Rahardjo Mendefinisikan pengelolaan secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “Kelola” istilah yang dipakai didalam ilmu manajemen biasanya merujuk pada proses mengurus serta menangani sesuatu dalam mencapai tujuan.

⁷ Coryanata, I, "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah" Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2, 2012, hlm.110.

d. Pengertian Organisasi mahasiswa

Organisasi mahasiswa adalah sekumpulan orang yang beranggotakan mahasiswa untuk mewedahi minat, bakat dan potensi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan intra dan ekstrakurikuler untuk mewujudkan tujuan yang sama dilingkungan perguruan tinggi keagamaan islam.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu indikator yang dapat didasarkan atas beberapa hal serta sifat yang dapat dilakukan pada waktu obsevasi.⁸ Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian ini.

Secara operasional penelitian ini memiliki tujuan yakni berusaha mendeskripsikan pengaruh variabel bebas transparansi dan akuntabilitas terhadap variabel terikat pengelolaan anggaran dana pengembangan Pendidikan organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan unuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah serta lebih memudahkan dalam mengikuti pembahasan dalam masalah dan isi penelitian ini. Sitematika pembahasan merupakan rangkuman gambaran analisis skripsi secara keseluruhan dari sitematika inilah dapat dijadikan suatu arahan bagi pembaca untuk menelaah secara urutan terdapat

⁸ Iwan Hermawan, “*Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Mixed Methode*”,(Jakarta: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), hlm. 52.

tiga bagian dalam penulisan skripsi yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman maka penulis menggunakan sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi yang dikeluarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data serta sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut dapat diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

BAB V PEMBAHASAN

Memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.